



| | |
|----------------|-----|
| Koran | Hal |
| Haluan | |
| Padang Ekspres | 13 |
| Singgalang | |
| Pos Metro | |

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LPP APBD Limapuluh Kota Dinilai Janggal

DPRD Disarankan ke BPK

Jakarta, Padek—Kepala Badan Keahlian DPR RI, Johnson Rajagukguk meminta DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendalami kejanggalan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2017 lalu. Caranya menurut Johnson, dengan menanyakan kepada Perwakilan Ba-

dan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sumbar.

"Kita sarankan mendalami apa yang diduga tidak sesuai itu. Kemudian kalau mereka kurang mendapatkan penjelasan, boleh meminta BPK yang ada di daerah sehingga nanti ada penjelasan tambahan dari apa yang sudah diperiksa oleh BPK," kata Johnson, di Gedung DPR RI, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (3/7).

Sebelumnya, pada Senin (2/7), Badan Keahlian DPR menerima delegasi

DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Sumbar, untuk berkonsultasi tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang LPP APBD.

Dijelaskan, pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan APBD itu adalah BPK yang perwakilannya ada di setiap provinsi di Indonesia. "Makanya kami sarankan minta laporan hasil pemeriksaan terhadap LPP APBD 2017 itu ke BPK yang ada di daerah. Di kabupaten atau kota belum



Makanya kami sarankan minta laporan hasil pemeriksaan terhadap LPP APBD 2017 itu ke BPK yang ada di daerah. Di kabupaten atau kota belum ada BPK

Johnson Rajagukguk

ada BPK," imbuhnya. Dalam pertemuan itu, kata Johnson, delegasi DPRD

Kabupaten Limapuluh Kota juga mengungkap bahwa kabupaten tersebut sudah tiga kali berturut-turut memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menyikapi hal tersebut, Johnson menjelaskan, bahwa prinsip umum dari penilaian WTP yang diberikan oleh BPK bukan berarti dikatakan bersih tanpa adanya penyimpangan. Penilaian itu diberikan berdasarkan sistem pelaporan atau administrasi pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan. Jika selama pelaporan sesuai dengan

ketentuan yang ada di dalam pengelolaan keuangan, maka itulah yang diberikan apresiasi oleh BPK dengan penilaian WTP tersebut.

"Tetapi secara substansial tidak berarti bahwa WTP itu menjamin tidak ada penyimpangan. Karena antara sistem pelaporan dengan perilaku yang ada di dalam pengelolaan adalah dua hal yang berbeda. Karena itu WTP tidak bisa jadi jaminan bahwa tak ada penyimpangan. Tapi kita harapkan memang kalau dia sudah WTP, adminis-

trasinya sudah bagus maka penyimpangan itu tidak ada. Itu harapan," jelasnya.

Terkait keluhan delegasi Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang mengatakan bahwa adanya kejanggalan dalam LPP APBD Tahun 2017, Johnson menilai hal itu hanya kekurangan penelitian dalam pembahasan awal APBD. "Hal itu bisa saja terjadi mengingat adanya kemungkinan perubahan yang diusulkan ke DPRD lalu luput dari perhatian secara administratifnya," pungkasnya. (fas/jpg)